



**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 14 TAHUN 2009**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009 ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (LembaRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 (Nomor 1 Seri A Nomor 1) ;
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Seri A Nomor 2);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 718.769.214.235,69 bertambah sejumlah Rp. 3.219.596.591,18 sehingga menjadi Rp. 721.988.810.826,87 sebagai berikut:
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah		
	a). Semula	Rp.	674.909.428.791,00
	b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>26.355.907.285,77</u>
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	701.265.336.076,77
2.	Belanja Daerah		
	a). Semula	Rp.	717.159.214.235,69
	b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.219.596.591,18</u>
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	720.378.810.826,87
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(19.113.474.750,10)

3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan		
a). Semula	Rp.	43.859.785.444,69
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(23.136.310.694,59)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	20.723.474.750,10
b. Pengeluaran		
a). Semula	Rp.	1.610.000.000,00
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	1.610.000.000,00
Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	<u>19.113.474.750,10</u>
SILPA setelah Perubahan :	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
1). Semula	Rp.	72.404.461.634,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>594.570.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	72.999.031.634,00
b. Dana perimbangan sejumlah		
1). Semula	Rp.	524.019.186.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.909.349.379,26</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	530.928.535.379,26
c. Lain-lain pendapatan daerah		
1). Semula	Rp.	78.485.781.157,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>18.851.897.906,51</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp.	97.337.769.063,51

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1). Semula	Rp.	41.138.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>600.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	41.738.000.000,00

b. Retribusi daerah

1). Semula	Rp.	21.207.505.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(5.430.000,00)</u>
Jumlah Retribusi setelah Perubahan	Rp.	21.202.075.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1). Semula	Rp.	1.857.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan	Rp.	1.857.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

1). Semula	Rp.	8.201.956.634,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	8.201.956.634,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1). Semula	Rp.	77.478.966.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.916.821.379,26</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	84.395.787.379,26

b. Dana alokasi umum

1). Semula	Rp.	404.247.220.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(7.472.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	404.239.748.000,00

c. Dana alokasi khusus		
1). Semula	Rp.	42.293.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	42.293.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Dana darurat

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1). Semula	Rp.	57.385.581.157,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>169.902.906,51</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp.	57.555.484.063,51

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1). Semula	Rp.	13.100.200.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.182.085.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	25.282.285.000,00

e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1). Semula	Rp.	8.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.500.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan dari Provinsi setelah perubahan	Rp.	14.500.000.000,00

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
	a. Belanja Tidak Langsung		
	1). Semula	Rp.	355.770.365.115,69
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(15.234.390.104,82)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	340.535.975.010,87
	b. Belanja Langsung		
	1). Semula	Rp.	361.388.849.120,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>18.453.986.696,00</u>
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	379.842.835.816,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
	a. Belanja pegawai		
	1). Semula	Rp.	335.318.792.100,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(15.939.513.000,00)</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	319.379.279.100,00
	b. Belanja bunga		
	1). Semula	Rp.	600.000.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	600.000.000,00
	c. Belanja subsidi		
	1). Semula	Rp.	400.000.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>50.000.000,00</u>
	Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	450.000.000,00
	d. Belanja hibah		
	1). Semula	Rp.	10.887.500.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	10.887.500.000,00

e. Belanja bantuan sosial		
1). Semula	Rp.	7.992.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>400.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Sosial setelah perubahan	Rp.	8.392.000.000,00
f. Belanja bagi hasil		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	0,00
h. Belanja tidak terduga	Rp.	
1). Semula	Rp.	572.073.015,69
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>255.122.895,18</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	827.195.910,87
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1). Semula	Rp.	48.253.754.500,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(471.908.000,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	47.781.846.500,00
b. Belanja barang dan jasa		
1). Semula	Rp.	128.658.221.004,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.190.686.796,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	133.848.907.800,00
c. Belanja modal	Rp.	
1). Semula	Rp.	184.476.873.616,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>13.735.207.900,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	198.212.081.516,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
	a. Penerimaan		
	1). Semula	Rp.	43.859.785.444,69
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(23.136.310.694,59)</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	20.723.474.750,10
	b. Pengeluaran		
	1). Semula	Rp.	1.610.000.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	1.610.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:		
	a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya		
	1). Semula	Rp.	40.059.785.444,69
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(23.136.310.694,59)</u>
	Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp.	16.923.474.750,10
	b. Pencairan dana cadangan		
	1). Semula	Rp.	0,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
	c. Hasil penjualan kekayaan daerah		
	1). Semula	Rp.	0,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
	d. Penerimaan pinjaman daerah		
	1). Semula	Rp.	0,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1). Semula	Rp.	3.800.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pinjaman setelah Perubahan	Rp.	3.800.000.000,00

f. penerimaan piutang daerah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1). Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang		
1). Semula	Rp.	610.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.	610.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman daerah		
1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pemeberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
12. Lampiran XI Daftar dana cadangan daerah;
13. Lampiran XII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
14. Lampiran XIII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

Pasal 6

Walikota Pontianak menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 September 2009



WALIKOTA PONTIANAK

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

Ir. H. Toni Herianto, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19541129 198003 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2009 NOMOR 13 SERI A NOMOR 3